



Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sula

Hendra Irawan Umabaihi¹, Nurliah Nurdin², Romli Arsyad³

¹ Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula,

^{2,3} Institut Pemerintah Dalam Negeri

Email : Umabaihi14@gmail.com

Abstrak

Studi ini membahas *Collaborative Governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi dalam proses penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yakni kejadian banjir yang sering terjadi tiap tahun menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, minimnya anggaran, kurangnya kerjasama antar sektor serta ketiadaan sumber daya mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi. tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis proses kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan banjir serta mencari model ideal dalam menangani banjir di kabupaten Kepulauan Sula. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, dan ditinjau dari beberapa literatur serta infroman dari masyarakat lembaga yang terlibat didalamnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu Akademisi atau perguruan tinggi. Selain itu Kurangnya sumber daya dari sisi Anggaran maupun Peralatan mengakibatkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal, hal ini ditunjukan melalui pendekatan teori *Collaborative Governance* Ansell ang Gash (2007) dimana penanggulangan banjir dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanggulangan Bencana

Abstract

This study discusses Collaborative Governance in flood disaster management in the Sula Islands Regency. The phenomena that occur in the flood management process in the Sula Islands Regency, namely flood events that often occur every year, are challenges for local governments, lack of budget, lack of cooperation between sectors and lack of resources affect the collaboration process that occurs. The purpose of the study was to analyze the collaborative process that occurred in flood management and find an ideal model in dealing with floods in the Sula Islands district. The research method used is a qualitative method, with data collection techniques based on the results of interviews, documentation and observations, and reviewed from several literature and infroman from the community of institutions involved in it. The results of the study show that the collaboration process has not gone well, this is seen from the lack of involvement of other stakeholders / actors in collaborating, namely academics or universities. In addition, the lack of resources in terms of budget and equipment results in flood management in the Sula Islands Regency running not optimally, this is shown through the collaborative governance theory approach Ansell

ang Gash (2007) where flood management can be seen from the initial conditions, institutional design and facilitative leadership that affects the collaboration process.

Keywords : Collaborative Governance, Disaster Management

PENDAHULUAN

Selama periode 2000-2016, Indonesia telah menanggung rata-rata sebesar Rp22,8 triliun per tahun hanya karena bencana alam dan non alam (Kemenkeu, 2020). Terdata pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu tahun 2020 telah terjadi 2.925 kejadian bencana alam di Indonesia yang terhitung sejak Rabu Tanggal 1 Januari 2020 sampai Selasa 28 Desember 2020. Berdasarkan data bencana hidrometeorologi, kejadian banjir telah terdata sebanyak 1.065 kejadian pada tahun 2020, selanjutnya bencana yang karena oleh angin puting beliung terjadi sebanyak 873 serta tanah longsor 572 kejadian, karhutla telah terjadi sebanyak 326, gelombang pasang dan abrasi 36 kejadian dan kekeringan terjadi sebanyak 29 kali di Tanah Air. Sedangkan untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, bahwa kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunung api dari total keseluruhan kejadian pada tahun 2020. Dari total kejadian tersebut korban meninggal dunia akibat dampak bencana alam tersebut ada sebanyak 370 jiwa, 39 orang yang hilang dan 536 jiwa mengalami luka-luka. Sementara itu kerusakan yang diakibatkan bencana sebanyak 42.762 rumah rusak fasilitas peribadatan sebanyak 727 unit, fasilitas pendidikan 672 unit, jembatan 442 unit, fasilitas kesehatan 143 unit dan fasilitas perkantoran sebanyak 134 unit. Salah satu upaya melakukan inovasi adalah dengan berkolaborasi. Sørensen dan Torfing dalam Martinez mengatakan “ *Collaboration can accelerate the innovation processes*”, (Kolaborasi dapat mempercepat proses inovasi). Pendekatan kolaboratif Dilakukan oleh World Bank melalui *Global Partnership for Social Accountability (GSPA)*, Di distrik Tajikistan seperti Muminabad, GSPA mendukung Oxfam di Tajikistan dan mitranya, Asosiasi Serikat Konsumen Tajikistan untuk membantu meningkatkan akuntabilitas sosial dalam penyediaan air dan sanitasi melalui pengembangan standar kualitas layanan dan partisipasi warga. GSPA telah membentuk jaringan lebih dari 200 Mitra Global – yang meliputi organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, yayasan, multilateral, dan sektor swasta – lintas sektor dan isu, untuk menciptakan lingkungan kolaboratif di mana umpan balik warga digunakan untuk memecahkan masalah mendasar dalam pemberian layanan dan untuk memperkuat kinerja lembaga publik.

Indonesia juga perlu melakukan kolaborasi dalam hal kebencanaan, sebagai negara yang menempati urutan ke-40 (risiko tinggi) dari 181 negara yang paling rentan terhadap bencana (The World Risk Index, 2020). Gempa bumi, banjir, dan tanah longsor menjadi tiga bencana yang paling sering terjadi dan berpotensi mengakibatkan kehancuran terbesar pada aset fisik di Indonesia. Kerugian karena terjadinya bencana membuat Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Selama periode 2000-2016, Indonesia telah menanggung rata-rata sebesar Rp22,8 triliun per tahun hanya karena bencana alam dan non alam. Diantara sekian banyak bencana di Indonesia salah satu bencana yang paling dirasakan masyarakat setiap tahun adalah bencana banjir, Kondisi banjir yang terjadi di Indonesia terkesan dilaksanakan belum secara maksimal dan seakan dilaksanakan sendiri - sendiri, seperti yang dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Propinsi Maluku Utara Mempunyai 10 kabupaten/kota yang juga mempunya potensi bencana yang cukup tinggi, salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Sula. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana

Indonesia (IRBI) 2020 terdapat 5 Kabupaten/kota di Maluku Utara yang mempunyai indeks resiko yang cukup tinggi, diantaranya Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Kepulauan Sula.

Gambar 1

Tabel nilai Indeks Risiko Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	KELAS RISIKO 2020
1	HALMAHERA SELATAN	224.40	224.40	224.40	213.82	213.82	213.82	TINGGI
2	HALMAHERA TIMUR	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	173.20	TINGGI
3	HALMAHERA UTARA	194.80	191.45	184.04	170.58	162.74	162.74	TINGGI
4	TIDORE KEPULAUAN	164.40	164.40	164.40	159.90	159.90	159.90	TINGGI
5	KEPULAUAN SULA	219.20	152.93	152.93	152.37	152.37	152.37	TINGGI
6	HALMAHERA BARAT	144.40	144.40	144.40	143.18	143.18	143.18	SEDANG
7	PULAU MOROTAI	166.40	120.69	120.69	119.61	118.44	118.44	SEDANG
8	TERNATE	160.40	128.13	119.85	111.93	104.49	104.49	SEDANG
9	HALMAHERA TENGAH	75.20	75.20	75.20	75.20	75.20	75.20	SEDANG

Sumber: IRBI (BNPB) 2020

Berdasarkan data dari IRBI sebagai salah satu Kabupaten di Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula mempunyai dampak resiko bencana yang tinggi. Dalam Proses penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Sula, Pemerintah Daerah melalui BPBD sebagai OPD yang memiliki tugas dan fungsi menetapkan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh harus siap menghadapi segala kemungkinan potensi Bencana yang terjadi, salah satunya adalah bencana banjir. Seperti yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2022 berdasarkan data TIMES Indonesia, diterima lansung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sula (BPBD Sula), terdapat 1.118 KK dari empat belas desa yang terdampak banjir.

Kejadian banjir dengan permukaan air mencapai ketinggian 60 - 70 cm ini menyebabkan rumah terdampak 750 unit, dan selain itu untuk infrastruktur publik BPBD menyebutkan fasilitas pendidikan terdampak 8 unit dan kesehatan 2 unit. Selain itu, beberapa unit fasilitas fisik yang terdampak berupa talud penahan banjir 2 unit, jembatan 2 unit, kantor 4 unit, serta terjadi kerusakan jalan sebanyak 2 titik. Berbagai unsur pemerintah turut serta dalam penanganan darurat, seperti TNI, Polri, aparat desa dan kecamatan serta beberapa OPD terkait. Melalui data kajian inaRISK, kecamatan terdampak termasuk 9 wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula berpeluang dengan potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi. Beberapa daerah terdampak teridentifikasi memiliki bahaya tanah longsor dengan kategori sama. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga agar tetap waspada dan siagai dalam menghadapi banjir. Masyarakat diharapkan agar tetap memantau kondisi cuaca guna mengantisipasi bahaya banjir, saat hujan lebat berdurasi lama. Warga diharapkan mengikuti arahan otoritas daerah dalam upaya-upaya tanggap darurat.

Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu tentang *Collaborative Governance* yang akan digunakan sebagai pembanding maupun rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Yoseph Molla (2021) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat” menemukan bahwa dalam pengelolaan kampung wisata Praijing sudah berjalan namun

belum efektif hal ini ditunjukan melalui pendekatan *Collaborative Governance* Ansell and Gash (2007) dimana Pengelolaan Kampung Wisata Praijing dilihat dari kondisi Awal, Design Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaborasi yang menghasilkan model kolaborasi di kampung Wisata Praijing.

Adji Suradji Muhamad (2017) Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses Tim Kolaboratif (PTK) ternyata menjadi variabel dependen, sedangkan lima prinsip lainnya antara lain, variabel visi struktural, budaya, kepemimpinan dan strategis ditetapkan sebagai variabel independent dependent yang mempengaruhi PTK. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan perbatasan Internasional di tingkat pemerintah pusat dan daerah di provinsi Kepulauan Riau masih lemah. Hal ini tercermin dari kinerja lima prinsip *Collaborative Governance* antara lain, *Collaborative Culture*, *Collaborative Leadership*, *Strategic Vision*, *Collaborative Team Process*, dan *Collaborative Structure* yang masih belum optimal. Dari kelima prinsip tersebut, hanya *Collaborative Team Process* (CTP) yang menunjukkan pengaruh tertinggi terhadap kolaborasi pemerintah. Variabel CTP mencatat kontribusi terbesar terhadap pembentukan tata kelola kolaboratif, diikuti oleh struktur, budaya, kepemimpinan dan visi strategis, dalam urutan itu. Faktor pendukung proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan perbatasan internasional di provinsi Kepulauan Riau antara lain ketersediaan tenaga pemerintah yang memadai dan sumber daya alam yang memadai. Sementara itu, faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam proses *Collaborative Governance* antara lain kurangnya komitmen dari semua pihak, tidak adanya kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan terbatasnya akses informasi, serta koordinasi yang tidak memadai.

Aziza Bila (2019) Hasil penelitian menemukan bahwa adanya strategi kolaborasi dalam pemerintahan tidak dilihat dari hasil, namun adanya model yang tidak hanya bertumpu pada proses saja atau hasil saja. Model yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi tepat dalam mencari solusi tata Kelola kolaboratif suatu pemerintahan.

Sukanti (2021) Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama, secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum kommunikasi secara khusus di tingkat pemerintah kabupaten dan masih kurangnya peran swasta.

Bima Ade Prayoga (2021) Penelitian menghasilkan temuan bahwa kondisi awal yang menyebabkan banjir di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, adalah penumpukan sampah di Sungai Ulu. BPBD Kabupaten Bekasi belum optimal dalam memegang kendali utama dalam kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan masih terhambat dari segi legalitas dan Proses Kolaborasi dinilai belum cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari kerja sama dengan swasta dan masyarakat yang masih hanya melalui proses komunikasi jarak jauh, kemudian untuk kerja sama dengan layanan PUPR, masih ada kendala seperti masih belum bisa menemukan opsi yang tepat untuk penanganan banjir.

Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq (2016) Penelitian ini menemukan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di wilayah sidoarjo telah berjalan cukup baik. Karena kolaborasi telah berkembang melalui *principel engagement*, *shared motivation* dan *capacity for join action*. Maka proses tersebut melanjutkan aksi dengan kolaborasi yang dapat mempengaruhi dampak sementara.

Berdasarkan tinjauan Pustaka belum ada penelitian yang mengambil study kasus *Collaborative governance* dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula. Relevansi penelitian terdahulu untuk peneliti yakni sebagai bahan pemahaman tentang proses *Collaborative Governance*

dalam penanggulangan bencana banjir dimulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana serta faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi menurut Ansell and Gash (2007).

Kajian Pustaka

Konsep Governance

Pada tahun 1980 istilah “*Governance*” mulai populer dan muncul sebagai Paradigma Baru di beberapa Negara Dunia. Pemahaman dari Paradigma yakni “*Implementing Agency*” tidak hanya menjadi monopoli pemerintah, namun mulai dirancang oleh Negara – Negara Barat yang tujuannya untuk meminimalisir peran negara dalam pembangunan dan mendelegasikan kepada actor lain (Arrozaaq 2017)[4] *Governance* sering di artikan sebagai padanan atau persamaan atau hampir sama untuk menggantikan istilah “administrasi publik” Istilah “*governance*” sebagai bentuk kata ganti dari “*government*” mempunyai Pemahaman yang sangat umum ditemukan akan tetapi perlu dipahami bahwa “*governance*” bukanlah sinonim dari “*government*”. *Governance* lebih berfokus pada keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan yang sangat kompleks terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi. (Dwiyanto, 2016)

Collaborative / Kolaborasi

Menurut Haryono (2012), kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait, baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dikutip dari Wanna (2008), secara epistemologi, kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘*co-labour*’ yang artinya bekerja bersama. sejak abad ke-19 kata kolaborasi muncul saat industrialisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Divisi sebagai bagian struktur organisasi mulai dibentuk untuk memudahkan pembagian tugas bagi tenaga kerja. Kerumitan organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi.

Collaborative Governance

Tidak efektifnya kinerja pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik sehingga memunculkan perspektif *Good Governance*. Munculnya perspektif *good governance* diartikan sebagai salah satu pandangan baru berdasarkan nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Pemahaman perspektif *good governance* bagi setiap orang berbeda-beda, namun bagi sebagian besar masyarakat membayangkan mereka akan mendapatkan pemerintahan yang baik, maka kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik semakin lebih baik, dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat. Kemudian akan mempercayai kualitas kinerja dari pemerintah (Tumengkol, 2015)

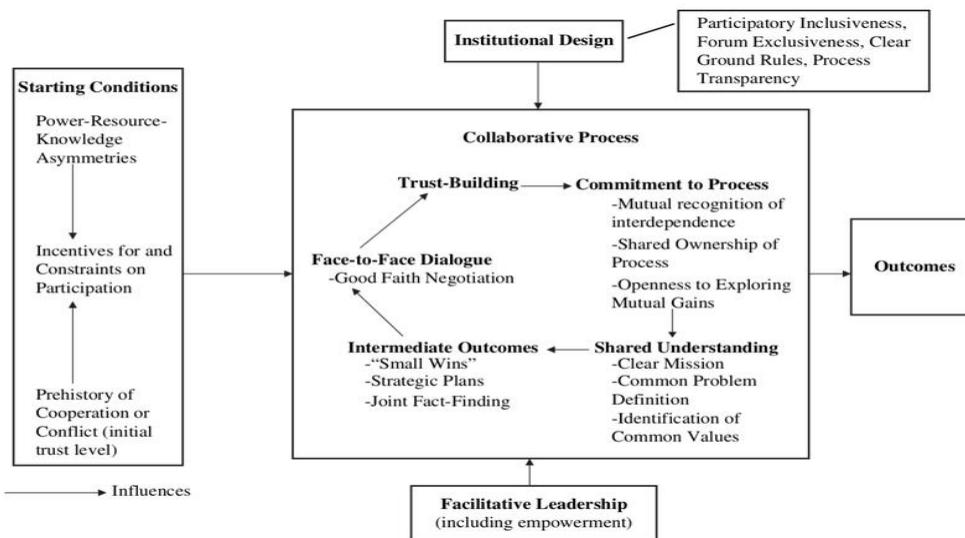
Ansell dan Gash dalam Islamy (2018)[5] mengatakan bahwa *collaborative governance* adalah suatu model yang menyatukan pemangku kepentingan umum, dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat konsensus. Dari pandangan ini dapat dilihat bahwa pada era demokrasi yang berjalan saat ini, proses dalam pembuatan sebuah keputusan guna menyelesaikan suatu masalah publik tidak dapat dilakukan oleh satu pemangku kepentingan saja, begitupun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Peran serta ataupun keterlibatan pemangku kepentingan atau *stakeholder* terkait, baik itu pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat adalah penting untuk dicermati dengan baik, sebab masalah publik dan pelaksanaan suatu kebijakan dapat memiliki implikasi yang luas serta penyelesaiannya bisa menjadi tidak optimal seandainya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Sesungguhnya terdapat banyak macam bentuk kerjasama yang dapat dilakukan

antara pemerintah bersama masyarakat serta sektor swasta dalam menjalankan pelayanan publik, pengelolaan manajemen pemerintahan maupun dalam penyelesaian masalah – masalah yang terjadi di masyarakat.

Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwa *Collaborative Governance* adalah: *A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*. (tata kelola pemerintahan kolaboratif adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan aktor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berfokus pada konsensus, serta konsultatif yang acuannya untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola suatu program serta aset publik).

Ansell and Gash (2008)[18] membuat model *Collaborative Governance*. Dalam model kolaborasi ini memiliki 4 (empat) variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan, dan Proses Kolaborasi. Masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Adapun variabel proses kolaboratif sebagai inti *collaborative governance*, sedangkan kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Seperti gambar berikut

Gambar 2. Model *Collaborative Governance* Menurut Ansell dan Gash



Sumber: Ansell & Gash (2007)

Sementara Tata Kelola Kolaboratif sebagaimana dipaparkan oleh Emerson (2015)[3] lebih diperluas dari pemahaman yang disampaikan oleh Ansell dan Gash. Emerson dkk membawa penjelasannya ke jenjang yang lebih tinggi melalui pengembangan teori kolaborasi yang dinamakan *Collaborative Governance Regime (CGR)*, istilah regime dipakai untuk menjelaskan himpunan dari prinsip yang secara eksplisit maupun implisit ada, pedoman atau norma, tata cara atau aturan, serta tahapan pengambilan kebijakan atau keputusan dalam sebuah proses kegiatan tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Ansell and Gash dalam mendeskripsikan Penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula dimana proses kolaborasi meliputi:

- 1) Face to face dialog
- 2) Trust Building
- 3) Commitment to Process
- 4) Share Understanding
- 5) Intermediate Outcome

Selanjutnya menganalisis faktor yang mempengaruhi kolaborasi yaitu:

- 1). Starting Condition
- 2). Fasilitatif Leadership
- 3). Institutional Design

METODE

a). Jenis Penelitian menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif

b). Lokasi Penelitian Kabupaten Kepulauan Sula

c). Jenis Data:

1. Data Sekunder bersumber pada BPBD Kabupaten Kepulauan sula. Penelitian terdahulu, dokumen, catatan, buku, laporan tertulis dan foto.
2. Data Primer berupa observasi langsung, wawancara langsung dengan informan.

d). Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu:

1. wawancara. Wawancara dengan para pelaku yang terlibat dalam proses kolaborasi penanggulangan bencana yaitu dari pemerintah daerah (Fasilitator dari BPBD, Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kadis PUPR, Kadis Sosial, Kadis DLH, Kabid pelayanan Kesehatan), Komisi III DPRD, Swasta (PT Jaya Lestari), Akademisi, dan Kepala Desa serta Masyarakat.
2. Dokumentasi. Study dokumentasi dilakukan terhadap data-data yang ada pada BPBD Kabupaten Kepulauan Sula, dokumen, catatan, buku-buku, laporan tertulis dan foto-foto dokumentasi kegiatan.
3. Observasi. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap gejala-gejala dalam proses kolaborasi dan untuk melihat fenomena-fenomena yang berlangsung.

e). Teknik Analisis Data.

Analisis data dilakukan meliputi 3 komponen. Yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Tata Kelola Kolaboratif berdasarkan rujukan oleh Ansell and Gash menggunakan 4 (empat) dimensi untuk mengukur proses yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terjadi bertujuan untuk mencapai sebuah konsensus di antara para pemangku kepentingan tersebut antara lain. Pertama, Proses Kolaboratif sebagai inti Tata Kelola Kolaboratif, Kedua, Terdapat 3 (Tiga) dimensi

lainnya yang mempengaruhi yaitu kondisi awal, Desain Kelembagaan, dan Kepemimpinan Fasilitatif (Ansell and Gash, 2007)

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula bahwa proses kolaborasinya dibagi menjadi tiga (3) tahap sesuai dengan manajemen penanggulangan bencana, yaitu 1). tahap pra bencana, 2). tahap tanggap darurat dan 3). tahap pasca bencana.

1. Proses kolaborasi.

Proses kolaboratif merupakan suatu kegiatan partisipasi dari para pemangku kepentingan berupa diskusi atau dialog yang menghasilkan suatu keputusan hasil konsensus yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan itu sendiri. Ansell dan Gash meneliti proses kolaborasi sebagai sebuah rangkaian yang mencakup dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), Komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*) dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

a). Face To Face Dialog

Face to face dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas kepentingan bersama. *face to face* (dialog tatap muka) dilakukan untuk menghasilkan pemahaman yang sama tentang tindakan yang akan di ambil.

Face to face dialog dilakukan dalam 3 tahap penanggulangan bencana yaitu:

1. Tahap pra Bencana.

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula bahwa proses kolaborasi seharusnya dikedepankan, tidak adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang seharusnya melakukan kolaborasi merupakan suatu permasalahan yang harus segera diatasi guna peningkatan kepercayaan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah selaku fasilitator leader bersama DPRD dalam membangun kolaborasi. Dialog tatap muka juga tidak dilangsungkan secara bersama-sama dalam waktu yang sama diantara pemangku kepentingan, sehingga menunjukkan bahwa adanya kolaborasi hanya karena adanya urusan atau tupoksi pada instansi Pemerintah Daerah tersebut. Sehingga menurut peneliti bahwa salah satu proses tidak optimalnya kolaborasi dalam penanggulangan banjir yang terjadi karena belum adanya dialog tatap muka diantara sesama pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam waktu yang sama sehingga usulan dari masyarakat dan pemerintah desa tidak terakomodir dengan baik karena belum adanya keputusan bersama terkait proses penanganan banjir pada tahap pra bencana.

2. Tahap Tanggap Darurat.

Proses dialog tatap muka pada saat tanggap darurat di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur berjalan dengan baik, adanya komunikasi yang dibangun antara pemerintah kepada pihak-pihak terkait. Komunikasi yang dibangun menjadikan segala urusan terkait penanganan bencana banjir tersebut dimudahkan untuk diatasi sehingga tantangan dan hambatan dapat di atasi dengan Kerjasama dan komunikasi yang baik dalam sebuah proses kolaborasi. Face to face serta dialog yang dilakukan menghasilkan pemahaman yang sama sehingga menghasilkan kesepakatan rincian informasi dan proses penanganan bencana banjir yang terkoordinir dengan baik sebagai rujukan pelaksanaan program dalam tahap tanggap darurat. namun pada Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan proses dialog tatap muka tidak pernah dilakukan.

3. Tahap Pasca Bencana.

Dialog tatap muka pada tahap pasca bencana dilakukan diantara pemangku kepentingan terkait upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dialog yang dilakukan diantara pemangku kepentingan terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Unsur TNI-Polri serta Kepala Desa setempat dan masyarakat terdampak. Semuanya memiliki peran masing-masing dalam upaya penanganan dampak banjir tersebut”

b). Trust Building

Dalam proses kolaborasi membangun kepercayaan diantara para pihak yang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan merupakan Langkah terbaik yang harus dilakukan. Pada proses pra bencana membangun kepercayaan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan antara Sekretaris Daerah dalam hal ini Sebagai Ex Officio Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD dengan DPRD telah ada kata Sepakat untuk penambahan anggaran BTT di tahun depan, namun keseluruhan anggaran itu tidak hanya untuk penanganan bencana banjir tapi keseluruhan bencana apabila terjadi bencana nantinya dan anggaran itu hanya dilakukan untuk penanganan darurat. Terkait penanganan banjir yang dimulai dari tahap pra bencana, seharusnya prosesnya dimulai dan dianggarkan melalui APBD bukan melalui dana BTT, sebab dana BTT hanya dapat digunakan untuk proses tanggap darurat apabila terjadi bencana, sedangkan proses tahap pra bencana seharusnya di anggarkan melalui APBD yang berkelanjutan sebab upaya penanganan banjir itu harus dimulai dari proses mitigasi bencana atau upaya pengurangan resiko bencana.

Peran para aktor dalam membangun kepercayaan dilaksanakan melalui kelompok kerja yang melakukan pengkajian partisipatif. Dalam hal penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula, membangun kepercayaan merupakan bagian dari proses kolaborasi yang turut serta dalam membantu proses keberlangsungan tahapan tanggap darurat dan pasca bencana sehingga diantara para aktor yang terlibat dan masyarakat memahami dan tahu proses yang sedang terjadi dan timbulnya rasa saling percaya.

c). Comtment To Proses

Kolaborasi dapat sepenuhnya terjadi apabila terdapat komitmen dari setiap pemangku kepentingan. Komitmen bergantung pada kepercayaan bahwa sesama pemangku kepentingan harus saling menghormati setiap pandangan dan menghargai kepentingan karena proses kolaborasi sebelum dilaksanakannya sebuah komitmen biasanya masih berjalan dengan tujuan tertentu, pemangku kepentingan harus mampu meyakinkan dirinya terhadap integritas dari prosedur musyawarah dan negosiasi.

Komitmen merupakan modal utama dalam kolaborasi sehingga penolakan-penolakan dari masyarakat dapat diminimalisir. Ukuran keberhasilan sebuah program adalah apakah dapat berpengaruh secara positif pada masyarakat.

Bentuk komitmen dilakukan pertemuan melalui forum resmi serta berdiskusi dan berdialog dengan DPRD terkait ketersediaan sumber daya anggaran dalam penanganan banjir. Pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana melakukan pemulihan serta normalisasi kali dan sungai serta pemenuhan kebutuhan warga terdampak dan ketersediaan air bersih dan pelayanan Kesehatan.

d). Share Understanding

Mengingat bencana adalah urusan bersama sehingga semua pihak perlu meningkatkan kesadaran penanggulangan bencana dan terlibat dalam pengurangan resiko bencana. peran para pemangku kepentingan dalam berbagi pemahaman dimulai dari pelaksanaan sosialisasi pada setiap bidang teknis dinas kepada masyarakat dan menyampaikan informasi dan pengetahuan agar masyarakat mempunyai

kepedulian dalam hal pengurangan resiko bencana serta mempunyai pengetahuan dan ketrampilan serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana.

Adanya pengetahuan diantara sesama pemangku kepentingan dapat membuat para aktor kolaborasi dapat belajar bersama, sehingga dalam proses belajar tersebut dapat menemukan strategi-strategi untuk mengurangi resiko bencana sehingga perlu dilakukannya normalisasi dan masyarakat menyetujui untuk Sebagian lahan kebunnya digusur untuk memudahkan jalannya aliran air.

e). Intermediate Outcome

Intermediate Outcome yaitu Hasil Sementara pada proses kolaborasi. Pada Tahap Pra Bencana Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang lain sudah berjalan dengan cukup baik diantara pemangku kepentingan namun dialog tatap muka yang terjadi tidak dalam waktu dan tempat yang sama. Para pemangku kepentingan melaksanakan proses kolaborasi sesuai dengan Tupoksi mereka masing-masing sehingga proses kolaborasi hanya bersifat urusan kelembagaan bukan dalam bentuk suatu proses kegiatan atau program bersama. Disisi lain salah satu aktor kolaborasi yaitu dari unsur Akademisi belum terjalin padahal perlu adanya Kegiatan pengabdian masyarakat yang berkolaborasi civitas akademika terkait dengan penguatan edukasi, penelitian dan pengabdian masyarakat, mulai dari riset-riset dasar pemahaman risiko, upaya mitigasi hingga kesiapsiagaan bencana.

Tahap tanggap darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Sula khususnya di Desa Waitina terdiri dari beberapa pemangku kepentingan dapat terlihat berjalan dengan baik, namun untuk Desa Buya yang baik. jarak yang jauh dengan ibukota kabupaten mengakibatkan penanganan banjir tidak berjalan dengan maksimal, hal ini menurut peneliti karena akses jalan serta jarak tempuh dari ibukota kabupaten sehingga membuat proses tanggap darurat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kendala berikutnya terletak pada persediaan peralatan dalam melakukan upaya tanggap darurat, yaitu pemerintah daerah tidak memiliki Eksavator (alat berat) untuk melakukan normalisasi sehingga membutuhkan bantuan dari pihak swasta, oleh karena itu peran swasta memang sudah sangat dibutuhkan mulai pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana untuk mendukung program penyelenggaran penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pada Tahap Pasca Bencana Hasil sementara yang dicapai dalam proses kolaborasi di Desa Waitina dilaksanakan cukup baik namun terjadi permasalahan terkait minimnya anggaran membuat penanganan banjir dalam melakukan normalisasi hanya dapat dikerjakan sepanjang 3 Km, dan kebutuhan pembuatan Talud sepanjang 7 Km belum bisa direalisasikan, yang berdampak pada penanganan banjir di kemudian hari tidak akan maksimal. Harus dilakukan normalisasi secara bertahap sambil menunggu adanya tanggul/talud yang akan dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Sula sendiri memiliki begitu banyak aliran kali yang terdapat lebih dari satu disetiap desa. Sehingga akan berdampak pada proses penanganan banjir secara keseluruhan, walaupun penanganannya dilakukan secara bertahap. Sementara berdasarkan hasil wawancara bahwa sumber pendapatan daerah lebih banyak bersumber pada DAU oleh pemerintah Pusat.

Faktor Yang Mempengaruhi.

a). Kondisi Awal.

Starting kondisi yaitu kondisi awal kolaborasi dilaksanakan, meliputi: sejarah kejadian dimasa lalu, potensi, dan insentif yang diharapkan dari proses *Collaborative Governance*. Kondisi awal kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula yaitu disebabkan karena 2

faktor yang menyebabkan pertama adalah Belum adanya Talud/ tanggul pembatas saluran air dan pemukiman warga yang kedua adalah naiknya permukaan dasar sungai/kali karena material pasir dan tanah yang dibawa pada saat banjir sehingga apabila curah hujan tinggi dapat menyebabkan banjir seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bahkan banjir yang sudah sering terjadi sebelum Kabupaten Kepulauan Sula di mekarkan atau semenjak jaman kecamatan dahulu dan sampai sekarang kejadian banjir tidak berkurang namun semakin meningkat sesuai dengan data banjir 3 (tiga) tahun terakhir yang ada pada Tabel 1.

Tabel 1
Kejadian Banjir Tahun 2020 – 18 Juli 2022

No	Tgl/ Bulan/ Tahun	Lokasi Kejadian		Data Kerusakan
		Kecamatan	Desa	
Tahun 2020				
1	5/8/2020	Sulabesi Tengah	Waiboga	5 Rumah Terdampak
2	5/8/2020	Sanana	Wailau	9 Rumah Terdampak
3	20/5/2020	Mangoli Tengah	Mangoli	
4	23/5/2020	Mangoli Timur	Naflo	1 Buah Rumah Rusak Sedang
5	26/5/2020	Sanana	Wailau	9 Rumah Terdampak
7	2/6/2020	Sanana	Mangon	6 Rumah Terdampak
8	2/6/2020	Sanana	Mangon	12 Rumah Terdampak
9	28/6/2020	Mangoli Selatan	Buya	18 Rumah Terdampak
10	4/7/2020	Mangoli Timur	Waitina.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 98 Rumah Terdampak ▪ Tanggul/Bronjong Jebol
Tahun 2021				
1	8/5/2021	Sanana	Wailau	14 Rumah Rusak sedang
2	5/8/2021	Sulabesi Selatan	Sekom	1. Talud Penahan Banjir Patah
3	7/8/2021	Mangoli Tengah	Mangoli	29 Rumah Terdampak
4	7/8/2021	Sanana	Waihama	8 Rumah Terdampak
Tahun 2022				
1	27/3/2022	Mangoli Timur	Waisakai	Talud Penahan Banjir Sungai Mangafuta Rusak Berat
2	11/7/2022	Mangoli Tengah	Capalulu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Talud Penahan Banjir Patah ▪ 1 Jembatan Rusak/ Putus
3	13/7/2022	Sanana	1. Pastina 2. Umaloya 3. Waiipa 4. Waihama 5. Fogi 6. Fatce 7. Falahu 8. Fagudu 9. Mangon	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 750 Rumah Warga Tergenang Air dan Lumpur ▪ 4 Buah Rumah Rusak Berat ▪ 3 Talud Penahan Banjir Patah

4	13/7/2022	Sanana Utara	1. Mangega 2. Pohea 3. Fukweu 4. Wainin 5. Fokalik	▪ 85 Rumah Warga Tergenang Air dan Lumpur ▪ Longsor Mengakibatkan 1 Buah Jalan Rusak
5	18/7/2022	Sulabesi Tengah	Waiman	▪ 8 Rumah Warga Tergenang ▪ 1 Masjid Tergenang Air

b). Desain Kelembagaan.

Belum adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), menjadikan kolaborasi yang terjadi harus melibatkan instansi dari beberapa unsur yang secara langsung tupoksi dan desain kelembagaannya berkaitan dengan dampak bencana yang terjadi ditambah dengan beberapa unsur serta instansi di luar pemerintahan yang terlibat termasuk pemerintah desa yang merupakan desa terdampak bencana serta masyarakat terdampak pada desa tersebut. proses kolaborasi yang terjadi terdiri dari beberapa lembaga yang dibentuk untuk terlibat dalam penanggulangan bencana banjir, Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi meliputi unsur pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah, Institusi TNI-Polri, Pemerintah Desa, Swasta dan masyarakat juga terlibat kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan partisipasi berarti adanya keterlibatan aktif dalam proses penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Keterlibatan tersebut dilaksanakan berdasarkan peran dan kedudukan masing-masing aktor yang mempunyai kepentingan. Dalam hal penanggulangan banjir yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan sesuai dengan: 1). Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain, 3). Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008. Pedoman Komando Tanggap Darurat, 4). Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Tupoksi BPBD, 5). Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Desa Waitina.

Partisipasi dari setiap pemangku kepentingan menjadikan kolaborasi dapat berjalan dengan baik Namun dalam hal ini keterlibatan peran swasta tidak hanya bertumpu pada satu atau dua perusahaan saja, dengan didasari bencana adalah urusan kemanusiaan dan bencana merupakan urusan bersama, sehingga diperlukan kerja sama setiap individu, lembaga ataupun kelompok dalam menangani urusan bencana tersebut. Terdapat beberapa Organisasi Masyarakat dan Pemuda yang turut serta mencari dan memberikan bantuan setelah kejadian bencana. Elemen mahasiswa dan pemuda yang langsung datang ke lokasi tersebut diantaranya Serikat Pemuda Kepulauan Sula (SEKEPAL), Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (Gema Rakyat), Solidaritas Fina Sua (SOFIA), Aliansi Pemuda Sula (APS), dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND).

c). Kepemimpinan Fasilitatif

Unsur kepemimpinan dalam kolaborasi tidak hanya diperuntukan bagi pemimpin pemerintahan atau pemimpin lembaga atau instansi organisasi, akan tetapi siapapun bisa menjadi pemimpin yang fasilitatif selama dia bisa menggerakan, memfasilitasi serta mendorong untuk mensukseskan tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Siapapun bisa menjadi pendorong serta memfasilitasi dan sebagai penghubung dan memimpin actor atau stakeholder dalam kolaborasi dapat disebut pemimpin yang fasilitatif. Dalam kepemimpinan fasilitatif, fasilitasi diberikan tanpa mengganggu pada hak para pemangku kepentingan, peran fasilitator adalah untuk memastikan integritas proses pembentukan consensus itu sendiri.

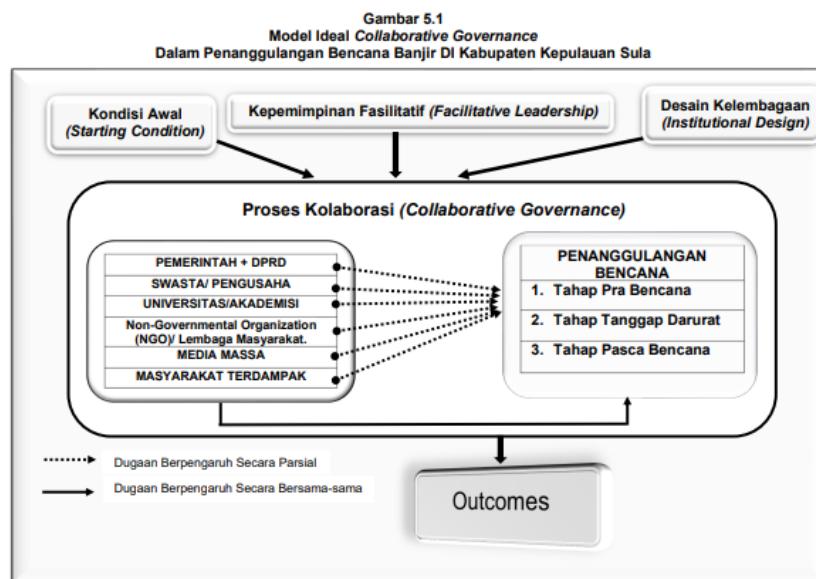
Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan dalam menjalankan kepentingan bersama.

Penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula Sekretaris Daerah dapat disebut sebagai pemimpin yang fasilitatif, mengingat posisinya dalam penanggulangan banjir sebagai Sekretaris Daerah, EX Officio Kepala BPBD yaitu sebagai instansi dan lembaga yang menangani permasalahan banjir sehingga proses kolaborasi dalam menjalin komunikasi dan penghubung antara pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat. Penempatan Sekretaris Daerah sebagai pejabat Ex Officio memudahkan pelaksanaan koordinasi karena memiliki jabatan yang lebih tinggi sehingga dalam memberi perintah kepada pejabata eselon II B/ Kepala Dinas/ Instansi Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Walikota/Bupati dan Sekertaris Daerah sehingga harus ada pejabat Ex Officio. Dalam hal penanggulangan bencana diperlukan koordinasi secara cepat dan perintahnya bersifat komando sehingga untuk membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lain diperlukan Kepemimpinan Fasilitatif sehingga Kepala Badan BPBD / EX Officio berkewajiban untuk selalu melakukan pendampingan dan penanganan banjir yang terjadi serta menyempatkan diri duduk berdiskusi dengan pemangku kepentingan yang lain untuk berbagi pemahaman bahkan memberikan arahan terkait dengan penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula.

SIMPULAN

Collaborative Governance dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula melalui pendekatan teori Ansell and Gash yang peneliti amati bahwa proses kolaborasi terjadi dalam 3 tahap, yaitu 1). Tahap pra bencana, 2). Tahap tanggap darurat, 3). Tahap pasca bencana belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu Akademisi atau perguruan tinggi. Kurangnya sumber daya dari sisi Anggaran maupun Peralatan mengakibatkan penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula berjalan tidak maksimal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya alat berat (Eksavator) untuk melakukan normalisasi dan minimnya anggaran penanggulangan bencana untuk pembuatan Talud/ tanggul.

Rekomendasi Peneliti bahwa Model Ideal *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan Gambar 3. Berikut



Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Kepulauan Sula dilihat dari prosesnya sesuai dengan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash. Proses kolaborasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. keterlibatan peran para pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap Penanggulangan banjir yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir antara lain:

- a) Kondisi Awal dimana proses terjadinya banjir dan pengalaman menghadapi banjir belum membentuk pola perilaku warga yang Tangguh bencana, namun modal sosial yang dimiliki masyarakat berupa hubungan kekerabatan dan gotong royong cukup berpengaruh positif dalam penanganan banjir. Pertemuan antara pemerintah daerah dengan DPRD belum menjadikan penanganan banjir menjadi isu prioritas.
- b) Kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi adalah fasilitator dari BPBD dalam hal ini Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala BPBD.
- c) Desain Institusi, Merupakan faktor yang paling menentukan dalam proses kolaborasi pada tahapan penanggulangan bencana karena mengatur tentang proses kolaborasi, kedudukan serta tugas dan tanggung jawab, serta fungsi masing-masing aktor yang terlibat. Forum dialog dengan lembaga DPRD juga mempengaruhi APBD walaupun secara langsung di ketahui penanggulangan bencana banjir belum menjadi isu prioritas dilihat dari penganggaran yang masih jauh dari harapan.

Dalam proses kolaborasi keterlibatan setiap pemangku kepentingan sangat berpengaruh terhadap suksesnya sebuah kolaborasi, sehingga peneliti mengusulkan agar Pemerintah Daerah membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan yang lain guna pelaksanaan *Collaborative Governance* yang lebih baik dalam proses penanggulangan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
- Astuti Retno, Warsono & Rachim, Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. 2020
- Dye, T. R. (1987). Understanding Public Policy. Prentice Hall.
- Eades, K. M. (2003). The New Solution Selling: The Revolutionary Sales Process That is Changing the Way People Sell. McGraw-Hill Education.
- Fernandes Simangunsong. 2016. "Metodologi Penelitian Pemerintahan". Bandung:Alfabeta.
- Hicks, H. G. (1972). The Management of Organizations: A Systems and Human Resources Approach. McGraw-Hill.
- Labolo, M.,dkk. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Bogor. CV Ghalia Indonesia. 2015
- La Ode Syaiful Islamy H, Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi, Deepublish 2018.
- Mohammad Mulyadi, Metode Penelitian Praktis: Kualitatif dan Kuantitatif (Jakarta:Publica Institute, 2014)
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bandung.CV Mandar Maju. 2012.
- Soehatman Ramli, Pedoman praktis manajemen bencana. 2010
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung. 2017
- Ansell, C., & Gash, A. *Collaborative Governance In Theory and Practice*. 2007, <https://Doi.Org/10.1093/mum032>
- Laia Martinez, *Theoretical Consideration about Innovation in the Public Sector. Institute of Society and Globalisation, Roskilde University*. 2012 hlm 7.

- Adji Suradji Muhamad, "Collaborative Governance Model in Managing International Borders in Riau Islands Province".2017 <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/28097/20251>
- Aziza Bila, "Collaborative Governance Strategi in Government Sector" 2019 <http://ita.lan.go.id/index.php/jta/article/view/114>
- Pitri Haryanti dkk, 2016, Etos Kerja Bangsa Jepang dalam Upaya Penanggulangan Banjir, Jurnal Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Komputer Indonesia, Majalah Ilmiah Unikom.
- Rulinawaty, "Implementation Of Collaborative Governance In Flood Management In The Greater Bandung Area".2022 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/14710/pdf_74
- Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, "Collaborative Governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Medan. 2022 <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/1121>
- Sukanti dan Nur Faidati, "Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman". 2021 <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/418>
- Bima Ade Prayoga, "Collaborative Governance dalam Penanggulangan banjr di Desa Tanjung sari, Kabupaten Cikarang Utara. 2021 <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/1121>
- Arrozaaq Dimas Luqito Chusuma. Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. Ilmu Administrasi Negara, Fisip, Universitas Airlangga. 2017, <https://repository.unair.ac.id/67685/3/Sec.pdf>
- Bowo, Dwi S. Good Forest Governance: Sebuah Keniscayaan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari. 2009 Jurnal Ilmu Kehutanan Vol. III, No. 1 Januari. UGM,Yogyakarta.
- Haryono.N. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Th IV. No.1, 2012
- Hadi, Dewi Utari. Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit di Propinsi DKI Jakarta. 2018
- Oswar Mungkasa, Tata Kelola Kolaboratif (Collaborative Governance) Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan. 2020. Hlm 2 https://www.academia.edu/43431805/MAKALAH_Tata_Kelola_Kolaboratif_Collaborative_Governance_Menata_Kolaborasi_Pemangku_Kepentingan
- Tumengkol, A.R. *Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggung jawabannya Dalam Rangka Good Governance*. Jurnal UNSRAT, Vol. III. No.1. 2015
- Islamy, L. O. S. *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish. 2018.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 22(1), 1–29. 2012, <Https://Doi.Org/10.1093/Jopart/Mur011>
- Agranof and Maguire. *Collaborative Public Management. New Strategic for Local Government*, 2003
- Emerson, Kirk dan Nabatchi, T. *Collaborative Governance Regimes*. Washington: Georgetown University Press. 2015
- Sukanti dan Nur Faidati, *Collaborative Governance dalam Upaya Penanggulangan Stunting* di Kabupaten Sleman. 2021
- Yoseph Molla, "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praijing di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, Tesis, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, 2021.